

SKRIPSI
ANALISIS NORMATIF KEWENANGAN PENYIDIK
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SEGITIGA
MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG ITE

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Disusun Oleh:

DAVA RIZKI ZAMZAMI

2210111013

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.

Efren Nova, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

ANALISIS NORMATIF KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SEGITIGA MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE

(Dava Rizki Zamzami, 2210111013, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Halaman, Tahun 2026)

ABSTRAK

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya melalui proses pengumpulan alat bukti yang sah. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap pola kejahatan, khususnya tindak pidana penipuan yang kini banyak dilakukan melalui platform media sosial. Salah satu modus yang berkembang adalah penipuan segitiga (*triangle fraud*), yaitu penipuan yang melibatkan pelaku, penjual, dan pembeli dalam skema manipulasi transaksi elektronik. Kondisi ini menuntut adanya penguatan kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai kewenangan penyidik serta menganalisis secara normatif pelaksanaan kewenangan tersebut dalam menangani tindak pidana penipuan segitiga melalui platform media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan segitiga diatur dalam KUHAP, KUHP Baru, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kewenangan tambahan berupa pemeriksaan sistem elektronik, akses data digital, dan keputusan akses akun maupun aset digital. Kedua, secara normatif kewenangan tersebut telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media sosial, namun masih terdapat keterbatasan berupa pengaturan pidana penipuan segitiga yang masih harus dikonstruksikan melalui KUHP dan UU ITE, potensi tumpang tindih kewenangan antara penyidik Polri dan PPNS, serta hambatan akses data lintas negara. Ketiga, dalam implementasinya penyidik masih menghadapi kendala dalam identifikasi pelaku, pembuktian elektronik, dan penelusuran aliran dana digital yang berpotensi mengakibatkan lambatnya penanganan tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kewenangan penyidik telah mengalami perkembangan yang menyesuaikan kejahatan digital, masih diperlukan optimalisasi pemanfaatan kewenangan yang ada dan pegasan koordinasi serta kemampuan teknis aparat penegak hukum agar penanganan tindak pidana penipuan digital dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: kewenangan penyidik, penipuan segitiga, media sosial, UU ITE, tindak pidana siber

***NORMATIVE ANALYSIS OF INVESTIGATORS' AUTHORITY IN
HANDLING TRIANGLE FRAUD CRIMES THROUGH SOCIAL MEDIA
PLATFORMS BASED ON THE ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS LAW***

(Dava Rizki Zamzami, 2210111013, Criminal Law, Faculty Of Law,
Andalas University, 83 Pages, Year 2026)

ABSTRACT

Investigation is an essential stage in the criminal justice system aimed at uncovering criminal offenses and identifying perpetrators through the collection of lawful evidence. The development of information technology has significantly transformed crime patterns, particularly fraud offenses, which are now frequently committed through social media platforms. One emerging method is triangle fraud, a scheme involving perpetrators, sellers, and buyers in the manipulation of electronic transactions. This phenomenon necessitates the strengthening of investigators' authority in handling digital-based crimes. This study aims to analyze the legal provisions governing investigators' authority and to conduct a normative analysis of the implementation of such authority in handling triangle fraud committed through social media platforms based on the Electronic Information and Transactions Law. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through library research based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, first, investigators' authority in handling triangle fraud offenses is regulated under the Criminal Procedure Code (KUHAP), the New Criminal Procedure Code, and Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, which grants additional powers such as the examination of electronic systems, access to digital data, and the suspension of access to accounts and digital assets. Second, from a normative perspective, these authorities provide a sufficient legal basis for investigators to handle fraud offenses committed through social media. However, several limitations remain, including the fact that the legal regulation of triangle fraud must still be constructed through the provisions of the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, the potential overlap of authority between National Police investigators and Civil Servant Investigators (PPNS), as well as obstacles in accessing cross-border electronic data. Third, in practice, investigators continue to face challenges in identifying perpetrators, examining electronic evidence, and tracing digital financial transactions, which may result in delays in the handling of criminal cases. This study concludes that although investigators' authority has evolved in response to the development of digital crime, further optimization of the existing authorities, clearer coordination mechanisms, and enhanced technical capabilities of law enforcement officers are still required to ensure the more effective handling of digital fraud offenses.

Keywords: investigators' authority, triangle fraud, social media, Electronic Information and Transactions Law, cybercrime